

Pembelian Saham Newmont Sah

JAKARTA - Pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh pemerintah tak kunjung tuntas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat pembelian tersebut tidak sah karena tidak disertai persetujuan DPR. Sedangkan pemerintah tetap beranggapan pembelian itu tidak melanggar hukum dan tidak perlu meminta izin parlemen.

"Kita sangat konfiden bahwa kita mempunyai dasar hukum untuk melakukan pembelian saham 7 persen Newmont tanpa perlu persetujuan dari DPR," kata Menkeu di kantornya kemarin.

Menkeu mengatakan pembelian saham NNT masuk kategori investasi yang bersifat sementara.

Izin kepada DPR hanya dilakukan untuk Penanaman Modal Negara (PMN) yang bersifat permanen. "Yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 41 di mana pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan investasi," kata Agus.

Dalam pasal tersebut, kata dia, disebutkan investasi pemerintah bisa berwujud pembelian saham, surat utang, ataupun bentuk sekuritas lainnya. "Kalau investasi dilakukan dengan

PMN, itu sifatnya penyertaan modal tetap dan ini yang perlu persetujuan DPR. Kalau yang investasi ini (pembelian saham NNT) adalah tidak memerlukan persetujuan DPR," katanya. Menkeu mengatakan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan institusi di bawah Kemenkeu bisa melakukan transaksi tersebut.

Status transaksi pembelian 7 persen saham asing, Nusa Tenggara Partnership BV (NTP BV), saat ini masih tersendat. Hambatan transaksi terjadi karena Kementerian ESDM baru memberikan surat pernyataan efektif, namun belum memberikan surat referensi untuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas transaksi senilai USD 246,8 juta itu. Hingga kini, PIP belum melakukan transaksi pembayaran, meskipun sudah menandatangani kontrak pembelian.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Harry Azhar Azis mengatakan parlemen bisa membatalkan pembelian saham NNT oleh pemerintah. "Pendapat BPK sudah jelas ada pelanggaran," kata legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Masalah saham PT NNT memang cukup rumit. Saat ini PIP juga tengah memeriksa kepemilikan 2,2 persen saham PT Indo-

nesia Masbaga Investama (IMI), yang mengambil alih sebagian saham PT Pukuafu Indah, hingga kepemilikannya berubah dari semula 20 persen menjadi 17,8 persen.

Selain Pukuafu dan IMI, komposisi "saham NNT saat ini adalah 49 persen dimiliki NTP BV. Perusahaan itu merupakan pemodal asing yang sahamnya dimiliki Newmont Nusa Tenggara Holding BV (anak usaha Newmont Mining Corporation, Nevada, AS) dan Nusa Tenggara Mining Corporation (anak usaha Sumitomo Corporation Tokyo, Jepang). Sedangkan 31 saham divestasi telah dibagi kepada pemerintah pusat sebesar 7 persen, dan PT Multi Daya Bersaing (MDB) sebesar 24 persen.

PT MDB dimiliki pemerintah provinsi NTB dan Pemkab Sumbawa Barat melalui melalui BUMD PT Daerah Maju Bersama (DMB) 25 persen dan Multicapital (Grup Bakrie, 75 persen). Dengan porsi itu, secara riil Pemda memiliki saham di NNT sebesar 6 persen, dan Multicapital 18 persen. Multicapital mengagunkan saham kepada Credit Suisse Singapore untuk memperoleh pembiayaan untuk pembelian saham. (sof)